

**Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada Generasi Muda dimasa Pandemi COVID-19**

**Jordan M. Rumengan<sup>1</sup>**

**Johannis E. Kaawoan<sup>2</sup>**

**Ismail Sumampow<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-02 yang merupakan salah satu jenis corona virus. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi ini. pandemi ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak pada kinerja organisasi pemerintahan di seluruh Indonesia, hal ini juga dirasakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang salah satu tugasnya mensosialisasikan wawasan kebangsaan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi utara sebagai pelaksana pendidikan wawasan kebangsaan yaitu keterbatasan jumlah peserta yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dikarenakan pembatasan sosial, lalu pengadaan sarana dan prasarana untuk mengadakan sosialisasi atau diskusi/dialog wawasan kebangsaan melalui aplikasi pertemuan secara daring yang belum dapat diadakan, dan beberapa kegiatan terkait dengan pendidikan wawasan kebangsaan juga ada yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran juga yang dialihfungsikan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pendidikan wawasan kebangsaan pada generasi muda dimasa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan kriteria untuk mengukur kemampuan kinerja menurut Bernardin dan Russel yakni: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan akan pengawasan dan pengaruh interpersonal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja dari badan terkait pelaksanaan kegiatan sudah baik, kuantitas kinerja dan ketepatan waktu dalam bekerja sudah baik namun tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan, lalu sarana dan prasarana seperti fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kegiatan wawasan yang dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi utara belum cukup memadai.

**Kata Kunci: Kinerja, Wawasan Kebangsaan, Generasi Muda**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak pada kinerja organisasi pemerintahan di seluruh Indonesia, hal ini juga dirasakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang salah satu tugasnya mensosialisasikan wawasan kebangsaan. sebagaimana yang diketahui wawasan kebangsaan merupakan salah satu hal yang penting dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu diperlukan pondasi yang kokoh dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya dengan melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan yang secara signifikan dilakukan, khususnya untuk generasi muda yang nantinya akan melanjutkan cita-cita dari bangsa ini.

Wawasan kebangsaan sendiri menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan, adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang diberikan dalam pendidikan wawasan kebangsaan seperti yang tertera di Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 pasal 7 poin 1 meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan dapat berupa seminar, diskusi/dialog seperti yang tertera di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 pasal 5 poin e dan poin f.

Untuk mewujudkan pendidikan wawasan kebangsaan yang baik, perlu adanya peran pemerintah yang berperan dalam mengadakan pendidikan wawasan kebangsaan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyelenggara pendidikan wawasan kebangsaan di Sulawesi Utara

dengan didasarkan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang salah satu poinnya berbunyi “Memperkokoh kesadaran Kesatuan dan Persatuan Nasional, Ideologi Negara serta komitmen kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan dilatar belakangi oleh pemikiran bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai tantangan utama yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia kedepan.

Tujuan pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan pada generasi muda adalah sebagai upaya memberikan cara pandang bagaimana menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun cara yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pendidikan wawasan kebangsaan berupa sosialisasi/seminar, diskusi/dialog yang sebelum masa pandemi dilaksanakan secara langsung dengan didukung sarana dan prasarana seperti gedung untuk melaksanakan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan. Dalam setahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencanangkan 4 kegiatan wawasan kebangsaan, yang terdiri dari pemantapan wawasan kebangsaan, kegiatan revolusi mental, kegiatan bela negara dan lain sebagainya.

Pada masa pandemi COVID-19 penerapan pendidikan wawasan kebangsaan tentunya mengalami kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi utara sebagai pelaksana pendidikan wawasan kebangsaan yaitu keterbatasan jumlah peserta yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dikarenakan pembatasan sosial, lalu pengadaan sarana dan prasarana untuk mengadakan sosialisasi atau diskusi/dialog wawasan kebangsaan melalui aplikasi pertemuan secara daring yang belum dapat diadakan, dan beberapa kegiatan terkait dengan pendidikan wawasan kebangsaan juga ada yang tidak dapat dilaksanakan

dikarenakan anggaran juga yang dialihfungsikan.

Tentunya diperlukan inovasi baru dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan Pendidikan wawasan kebangsaan pada generasi muda dimasa pandemi COVID-19, Sehingga program pendidikan wawasan kebangsaan ini dapat dilaksanakan disetiap tahunnya walaupun dengan segala kendala yang dihadapi.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian Novriyanto Wartabone Mandak. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Adat "(Studi Kasus Di Badan Kesbangpolda). Pembinaan ormas yang seyogyanya di laksanakan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah dan pembangunan demokrasi antara lain, kesatuan, adanya kesepakatan terhadap nilai nilai dasar, ideologi dan cita cita untuk bersatu menjadi suatu bangsa (Integrasi normatif). kedua, adanya rasa ketergantungan fungsional dan manfaat fungsional yang konkrit dari tiap ormas dengan terintegrasi dalam satu kesatuan (Integrasi fungsional), ketiga, adanya kekuatan dalam menjaga komitmen tiap ormas untuk menciptakan kestabilan dan keteraturan (Integrasi koersif).. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan Pihak kesbangpolda sendiri dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan selalu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan juga generasi muda. Hal ini dikarenakan kesbangpolda dalam pelaksanaan sosialisasi membutuhkan bantuan dari semua elemen masyarakat yang ada, karena pembinaan organisasi kemasyarakatan ini perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang ada, agar supaya tujuan dari pembinaan organisasi

kemasyarakatan ini dapat berjalan dengan baik

#### **Konsep Kinerja**

Bernardin dan Russel (dalam Ruky:2001) mendefinisikan kinerja atau performance sebagai catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dan fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Bernardin dan Russel (dalam Suryadi dan Rosyidi 2013) mengungkapkan 6 kriteria utama untuk mengukur kinerja yakni kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan akan pengawasan, dan pengaruh interpersonal. Kriteria-kriteria tersebut berhubungan satu sama lain untuk mengukur kemampuan kinerja.

##### a. Kualitas (quality)

Tingkat dimana proses atau hasil dari kegiatan yang sempurna dengan kata lain, mampu melaksanakan kegiatan dengan cara yang ideal atau sesuai atau menyelesaikan sesuatu dengan tujuan yang tetapkan.

##### b. Kuantitas (quantity)

Sejauh mana kemampuan menghasilkan sesuatu sesuai dengan jumlah standar yang berhasil diselesaikan. Dalam kurun waktu tertentu.

##### c. Ketepatan Waktu (timeless)

Tingkat dimana kegiatan diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari yang ditetapkan dan menggunakan waktu yang tersedia untuk kegiatan lain

##### d. Efektivitas Biaya (cost of effectiveness)

Tingkat dimana penggunaan sumber-sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan materi dimaksimalkan untuk mendapatkan target yang tertinggi atau sebaliknya.

##### e. Kebutuhan akan Pengawasan (need of supervision)

Tingkat dimana seorang dapat melakukan atau melaksanakan pekerjaan tanpa harus ditemani oleh pengawas atau tanpa harus mengikutsertakan intervensi dari pengawas untuk menghasilkan hasil kerja yang baik.

f. Pengaruh Interpersonal (interpersonal input)

Tingkat dimana seseorang dapat menjaga harga diri, nama baik, dan kerjasama, diantara rekan kerja dan bawahan.

Organisasi yang baik adalah organisasi yang berhasil mencapai visi, misi, dan tujuannya. Keberhasilan organisasi tentu didukung oleh suatu kinerja yang maksimal oleh individu-individu di dalamnya. Kinerja organisasi merupakan pencapaian hasil pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.

Menurut Amitai Etzioni (Keban, 2008:227) kinerja organisasi menggambarkan seberapa jauh suatu organisasi merealisasikan tujuan akhirnya. Sedangkan menurut Bastian (Tangkilsan, 2005:175) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut.

**Konsep Pendidikan**

Pendidikan (education) secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Paedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantarkan anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para paedagogos. Istilah ini berasal dari kata paedos yang berarti anak, dan agogos yang berarti saya yang membimbing atau memimpin.

Menurut Langeveld (1971:5) pendidikan adalah setiap usaha pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu agar anak cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Lalu menurut Prof. DR. N Driyarkara, pendidikan ialah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani.

Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berarti upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak) dalam taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya (Ki Hajar Dewantara, 1997:14).

**Konsep Wawasan Kebangsaan**

Menurut S.A Kodhi, wawasan kebangsaan terdiri dari kata wawasan dan kebangsaan. Wawasan berasal dari kata mawas yang dalam bahasa mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan inderawi dan dalam istilah lain wawasan mengandung arti paham atau keyakinan tentang suatu hal, cara pandang, cara tinjauan dan tanggapan inderawi. Kebangsaan berasal dari kata bangsa atau nation yang diartikan sebagai kelompok manusia berasal dari keturunan nenek moyang yang sama (Nuryanti, 2014:129).

Cara pandang bangsa Indonesia itu juga merupakan perwujudan dialog dinamis bangsa Indonesia dengan lingkungannya sepanjang sejarahnya dan juga dengan kondisi geografisnya. Kondisi alamiah Indonesia yang tergelar secara tipikal memberikan suatu karakteristik dalam persepsi diri dan konsepsi pengembangan dirinya (Kodhi dan Soejadi, 1994:97)

Adapun menurut Soemarno Soedarsono (2008:21) wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap diri sendiri sebagai bangsa yang harus mencerminkan rasa semangat kebangsaan (karakter bangsa) dan mampu mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa yaitu Pancasila.

Wawasan kebangsaan merupakan salah satu sikap atau sifat mengenal lebih dekat dan mempelajari bangsanya agar menimbulkan rasa nasionalisme dalam jiwa mereka. Di dalam pendidikan wawasan kebangsaan harus ditanamkan kepada siswa agar dapat menghargai bangsanya dan pahlawannya serta bangga akan bangsanya yaitu Indonesia (Alfian, 2014)

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada generasi muda dimasa pandemi COVID-19 dengan mengacu pada teori yang disampaikan oleh Bernardin dan Russel terkait dengan kriteria untuk mengukur kemampuan kinerja.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi
3. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
4. Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Kebangsaan
5. Staff Pelaksana
6. Generasi Muda

### Hasil Wawancara

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan yang mengetahui tentang pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan pada generasi muda dimasa pandemi COVID-19

Informan 1 inisial FS (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara) ditanyakan mengenai apakah ada regulasi di daerah yang mengatur tentang pendidikan wawasan kebangsaan? Informan menjelaskan bahwa untuk regulasi diatur oleh BPPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) berupa Kepres, tapi di daerah belum ada.

Informan 2 inisial NS (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara) ditanyakan mengenai Bagaimana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pendidikan wawasan kebangsaan pada generasi muda dimasa pandemi COVID-19? Informan menjelaskan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Provinsi Sulawesi Utara untuk mengukur kinerja ada IKU (indikator Kinerja Utama) salah satu ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja pendidikan wawasan kebangsaan adalah persentase pelaksanaan program yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Alat ukurnya adalah berapa banyak sosialisasi yang dilakukan dan berapa efektif itu. Dalam pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan khususnya bagi generasi muda, sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yakni mahasiswa, siswa. Selama ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai strategi dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan, berupa pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan secara direct atau langsung kemudian menjalin kerjasama dengan institusi-institusi lain. Kalau kinerja diukur dari dua aspek itu, maka aspek yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan secara direct atau langsung itu sangat efektif, sudah cukup bagus kinerjanya karena antusiasme yang bagus dan tingkat penerimaan yang bagus. Kemudian yang kedua menjalin kerjasama dengan institusi lain baik itu institusi pemerintahan atau institusi publik seperti Yayasan, atau Ormas atau LSM yang boleh terlibat dalam pendidikan atau pembinaan wawasan kebangsaan itu juga kinerjanya sudah cukup baik.

Informan 3 inisial MK (Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa) ditanyakan bagaimana bapak melihat kualitas sumber daya manusia yang ada di badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi utara khususnya yang ada di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan pada saat pandemi covid-19? Informan menjelaskan bahwa untuk sumber daya manusia, terus ditingkatkan dengan melakukan pembelajaran diklat khusus dan mengikuti seminar sampai tingkat pusat sehingga diharapkan kemampuan sdm aparatur akan lebih meningkat lagi. Untuk saat ini kemampuan untuk

penggunaan alat komunikasi, penggunaan alat-alat atau sarana prasarana yang lebih maju sesuai teknologi yang lebih maju belum banyak yang memahami dan mengetahui, itu mungkin pengaruh latar belakang pendidikannya dan usianya.

Informan 4 inisial SS (Kepala Sub Bidang ideologi dan Kebangsaan) ditanyakan ada berapa banyak program/kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan yang dicanangkan dalam setahun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara? Informan menjelaskan bahwa dalam setahun ada 4 program kegiatan yang tertata dalam DPA dan itu akan dilaksanakan dan setiap tahun itu berbeda karena menyesuaikan dengan anggaran yang disetujui oleh DPRD.

Informan 5 berinisial MS (staff pelaksana) menjelaskan juga bahwa di tahun 2021 pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan ada 4 kegiatan karena terkendala masih pandemi COVID-19 dan ada refofusing anggaran dari badan keuangan untuk penanganan COVID-19. Jadi pelaksanaannya hanya 4 kegiatan terkait dengan wawasan kebangsaan. Ditanyakan juga apakah kegiatan di tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan? Informan menjelaskan bahwa untuk kegiatan di tahun 2021 yang tercantum dalam DPA memang di triwulan 1 jadi kegiatan yang terlaksana hanya di triwulan 1, kegiatan di triwulan 2, 3 dan 4 tidak terlaksana karena refofusing anggaran,

Informan 6 inisial EG (staff pelaksana) ditanyakan sebagai pelaksana, apakah selama pelaksanaan kegiatan pernah terjadi konflik/perselisihan antara bapak dan rekan kerja bapak? Informan menjelaskan bahwa selama bekerja tidak pernah berselisih paham dengan sesama rekan kerja sehingga selalu terjalin hubungan kerja yang baik antar sesama pekerja.

Informan 7 inisial AR (generasi muda) ditanyakan bagaimana anda menilai kualitas kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan dimasa pandemi covid-19 oleh badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi

Sulawesi utara? Informan menjelaskan bahwa kualitas kegiatan sudah bagus, karena walaupun pandemi covid-19 dengan segala keterbatasan yang dihadapi, badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi utara tetap melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan tersebut, walaupun cara yang digunakan cukup riskan dengan melaksanakan sosialisasi secara langsung, tetapi materi-materi yang disampaikan itu bagus menyangkut Pancasila dan 4 pilar.

Informan 8 inisial DM (generasi muda) ditanyakan juga bagaimana kualitas kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan dimasa pandemic covid-19 oleh badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi utara? Informan menjelaskan bahwa kegiatan masih sama bagusnya, tetapi kurang dirasakan dimasa pandemi covid-19.

### **Pembahasan**

Untuk mengetahui kinerja badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi Utara dalam pendidikan wawasan kebangsaan pada generasi muda dimasa pandemi covid-19, maka peneliti menggunakan 6 kriteria untuk mengukur kemampuan kinerja oleh Bernardin dan Russel yaitu:

### **Kualitas (Quality)**

Kualitas, tingkat dimana proses atau hasil dari kegiatan yang sempurna dengan kata lain, mampu melaksanakan kegiatan dengan cara yang ideal atau sesuai atau menyelesaikan sesuatu dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini untuk mengukur kualitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari para generasi muda bahwa kualitas kegiatan baik, tetapi kurang dirasakan dimasa Pandemi Covid-19, karena pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada generasi muda dimasa Pandemi Covid-19 masih dilaksanakan secara luring atau direct/langsung. Jika dikaji menggunakan teori yang digunakan, maka ditemui bahwa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum mempunyai cara atau inovasi yang ideal terkait pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan. Pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan 3 kegiatan Wawasan Kebangsaan dari jumlah 4 kegiatan yang dicanangkan. Program atau kegiatan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

NO	NAMA KEGIATAN
1	Focus Group Discussion (FGD) Pemantapan Wawasan Kebangsaan Di Tengah Pandemi COVID-19 Bagi Generasi Muda
2	Rapat Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tahun 2021
3.	Pemantapan Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Tahun 2021

Sumber: Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan analisis dari peneliti, walaupun kegiatan dilaksanakan dengan cara yang cukup beresiko, mengingat pandemi covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir, dan peningkatan dan penurunan virus ini di Sulawesi Utara yang tidak pasti, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara tetap berupaya melaksanakan kegiatan tersebut dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah baik.

#### Kuantitas (Quantity)

Kuantitas, Sejauh mana kemampuan menghasilkan sesuatu sesuai dengan jumlah standar yang

berhasil diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini jumlah kegiatan yang dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan pendidikan wawasan kebangsaan, dimana setiap tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencanangkan 4 kegiatan yang terbagi dalam 4 triwulan, namun di masa pandemi covid-19 kegiatan-kegiatan tersebut yang tercantum dalam DPA tidak semua yang dapat dilaksanakan. Pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencanangkan 4 kegiatan wawasan kebangsaan dan yang terlaksana hanya 3 kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut adalah pemantapan wawasan kebangsaan ditengah pandemi covid-19, rapat perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, dan pemantapan kesadaran bela negara bagi generasi muda. Dimana berdasarkan analisa dari peneliti untuk kuantitas kegiatan yang dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, dari jumlah 4 kegiatan yang dicanangkan 3 kegiatan berhasil dilaksanakan.



Gambar 2 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan FGD Pemantapan Wawasan Kebangsaan di tengah Pandemi COVID-19



Gambar 3

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Rapat Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan



Gambar 4

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Muda

**Ketepatan Waktu (Timeless)**

Ketepatan waktu, tingkat dimana kegiatan diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari yang ditetapkan dan menggunakan waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. kegiatan yang dicanangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang tercantum dalam DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) tidak semuanya dapat terlaksana, beberapa kegiatan terpaksa tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19 dan juga dikarenakan refofusing anggaran. Dari 4 kegiatan yang dicanangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2021 hanya 3 kegiatan yang dapat dilaksanakan, dan 1 kegiatan yakni revolusi mental yang tidak dapat dilaksanakan. Hal ini membuat ketepatan waktu dalam pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan ada yang tidak sesuai waktu yang direncanakan, tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara selalu berupaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai waktu yang direncanakan.

**Efektivitas Biaya (Cost Of Effectiveness)**

Efektivitas Biaya, tingkat dimana penggunaan sumber-sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan materi dimaksimalkan untuk mendapatkan target yang tertinggi atau

sebaliknya. penggunaan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana seperti teknologi untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan wawasan kebangsaan dimasa pandemi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta keuangan belum cukup maksimal. Hal ini dibuktikan dengan belum dapat diadakannya pendidikan wawasan kebangsaan dengan cara lain selain sosialisasi secara langsung. Walaupun mendapat pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara tetapi sebagian anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan covid-19 di Sulawesi Utara. lalu, dikarenakan sarana dan prasarana yang belum cukup memadai sehingga pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan secara daring belum dapat dilakukan. anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk mengadakan pendidikan wawasan kebangsaan belum dapat diadakan juga. pengaruh sumber daya manusia sebagai pelaksana pendidikan wawasan kebangsaan juga yang belum cukup mahir dalam penggunaan teknologi menjadi salah satu faktor juga mengapa pendidikan wawasan kebangsaan pada generasi muda belum dapat dilaksanakan secara daring.

Berdasarkan analisis dari peneliti, anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan yang bersumber dari APBD Sulawesi Utara sudah cukup, karena sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk pelaksanaan kegiatan selama setahun. Namun, karena situasi dan kondisi yang penuh keterbatasan sehingga anggaran untuk pelaksanaan kegiatan terpaksa dialihfungsikan untuk penanganan covid-19 di Sulawesi Utara.

**Kebutuhan akan Pengawasan (Need of Supervision)**

Kebutuhan akan pengawasan, dalam pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan, penanggung jawab kegiatan dalam hal ini kepala bidang selalu melakukan pengawasan kepada para



pelaksana di lapangan sehingga mereka mempunyai arah untuk bekerja. Selain itu selalu ada evaluasi bagi para pelaksana setelah selesai pelaksanaan kegiatan, untuk mengevaluasi hal-hal apa saja yang harus diperbaiki, sehingga para pelaksana atau pegawai mempunyai arah/patokan dalam bekerja kedepan ketika pelaksanaan kegiatan lain terkait pendidikan wawasan kebangsaan.

#### **Pengaruh Interpersonal (Interpersonal Input)**

Pengaruh interpersonal, dalam tugas dan tanggung jawab para pegawai di badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi utara khususnya bidang yang melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan, dalam bekerja selalu terjalin hubungan yang baik, koordinasi antara sesama pekerjapun dapat dikatakan baik, sehingga pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan selalu berhasil dilaksanakan dengan baik.

#### **Penutup**

##### **Kesimpulan**

1. Kemampuan memberi Kualitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara baik, walaupun tidak secara maksimal dilaksanakan dimasa pandemi covid-19, namun pemahaman terkait bangsa dan negara selalu dibagikan kepada generasi muda, berdasarkan penilaian dari para generasi muda terkait kualitas kegiatan wawasan kebangsaan, tetapi kurang dirasakan dimasa pandemi covid-19 karena pelaksanaan kegiatan selalu sama tiap tahunnya, belum ada inovasi atau cara yang ideal dari badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi utara terkait pendidikan wawasan kebangsaan pada generasi muda
2. pelaksanaan program atau kegiatan wawasan kebangsaan pada generasi muda yang tidak semuanya dapat dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan.
3. sumber daya manusia di bidang Bina ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sebagai pelaksana

pendidikan wawasan kebangsaan yang kurang cukup mahir dalam pemanfaatan teknologi, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan yang belum cukup memadai

4. dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, penanggung jawab dalam hal ini kepala bidang selalu melakukan pengawasan kepada para pelaksana, hal ini terbukti dengan kegiatan wawasan kebangsaan yang selalu terlaksana dengan baik

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, selalu terjalin hubungan yang baik antara sesama pekerja, hal ini dibuktikan dengan data dan informasi yang diperoleh bahwa tidak pernah terjadi perselisihan antara sesama pekerja atau pegawai dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan

#### **Saran**

1. kualitas kegiatan baik, tetapi badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi utara harus mempunyai cara yang ideal kedepan untuk pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, sehingga badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi utara selalu siap mengadakan kegiatan terkait wawasan kebangsaan walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi.
2. berkenaan dengan poin yang pertama, bahwa badan kesatuan bangsa dan politik daerah provinsi Sulawesi utara harus mempunyai cara yang ideal, atau inovasi terkait pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, sehingga kegiatan-kegiatan wawasan kebangsaan bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan
3. pemanfaatan sumber-sumber daya yang tersedia dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan lagi, seperti sumber daya manusia yang harus lebih ditingkatkan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan

4. pengawasan yang harus tetap dilaksanakan, walaupun dengan tanpa adanya pengawasan pegawai selalu bekerja dengan baik, tetapi pengawasan tetap perlu agar pegawai bisa bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan bisa tercapai.
5. hubungan baik dalam bekerja yang harus terus dibina antar sesama pegawai, sehingga kemungkinan untuk terjadi perselisihan dalam bekerja semakin kecil antar sesama pegawai

#### Daftar Pustaka

- Dewantara, K. H. (1954). *Masalah Kebudayaan. Pertjetakan Taman Siswa*. jogjakarta: Pertjetakan Taman Siswa.
- Driyarkara. (1980). *Tentang pendidikan*. yogyakarta: yayasan kanisius.
- Erikson, E.H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton
- Hariandja, Marihat Tua Efendi, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Grasindo, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. S. P, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Indrawan.Ws. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media
- Kirk, J. & Miller, M. L., 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications.
- Kodhi, S. A., & Soejadi, R. (1994). *Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Langeveld. (1971). *Paedagogik Teoritis/Sistematis*. Jakarta: FIP- IKIP.
- Mangkunegara, Dr. A.A.Anwar Prabu, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung; Alfabeta. PT. Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruky, Achmad S. 2004. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sedarmayanti, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung; Refika Aditama
- Soedarsono, S. (2008). *Membangun Kembali Jati Diri Bangsa Peran Penting Karakter dan Hasrat untuk Berubah*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT.Gramedia
- Taylor, B. R. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- T. Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media
- Umam. Khaerul. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Pustaka Setia
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. (edisi 3) Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Jurnal :**
- Alfian Thoriq Dwi. 2014. *Penanaman Nilai Wawasan Kebangsaan dan Patriotisme melalui Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten*. Dalam e-Journal UNY. Hal. 9-10
- Florence 2016. "Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dalam Pembinaan wawasan kebangsaan di Kabupaten Malinau".
- Karsau G.M, Kaawoan JE, Kumayas N (2017) *Kinerja Aparatur Pemerintah Distrik Dalam Pelayanan Administrasi (Studi di Distrik Klamono Kabupaten*

- Sorong). Dalam e-Journal Eksekutif. Hal 3. Vol 1. No.1
- Mandak W.N, Gosal R, Monintja K.D. 2022. Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Adat (Studi Kasus di Badan Kesbangpolda). Dalam e-Journal Governance. Hal 1. Vol.1. No.1
- S N. Syaidatul, Nurcahyanto H. Analisis Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

**Sumber Lain:**

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan
- Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara